

**ANALISIS REALISASI PENCAPAIAN TARGET  
PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA KANTOR DINAS  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral  
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**OLEH**

**Melda Yunita  
NIM : 10975006913**



**PROGRAM S.1  
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2013**

**ANALISIS REALISASI PENCAPAIAN TARGET  
PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA KANTOR DINAS  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**Melda Yunita  
NIM : 10975006913**



**PROGRAM S.1  
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
  
2013**

## **Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun**

*Abstrak*

**OLEH: MELDA YUNITA**

*Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai pembiayaan umum pemerintah dan pembangunan infrastruktur umum. Pada Kabupaten Karimun penerimaan pajak daerah setiap tahunnya selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang sangat baik dan harus diapresiasi. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah (1) apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target terealisasi penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun (2) faktor apakah yang memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak daerah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui faktor-faktor saja yang dapat mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun (2) untuk mengetahui faktor apa yang memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak daerah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, sampel yang digunakan adalah purposive sampling dimana hanya sebagian pegawai saja yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu yang ahli dan memahami tentang realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karimun. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah pendapatan perkapita, pertumbuhan penduduk, jumlah hotel, jumlah wisatawan, jumlah pelanggan listrik, jumlah perusahaan pertambangan dan jumlah petugas pajak. Faktor yang memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karimun adalah jumlah perusahaan pertambangan karena Kabupaten Karimun kaya akan hasil tambang seperti pasir, granit, dan tanah urug, yang semua hasil penjualannya akan dikenakan pada pajak bahan galian golongan C.*

## KATA PENGANTAR



Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada seluruh umat seklaian alam. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, berkat Beliaulah kita dapat menikmati ilmu pengetahuan hingga saat ini. Semoga kita akan mendapatkan syafa'at Beliau di akhir kelak, amin ya Rabbal Alamin

Karya ilmiah ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas dan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Proses yang cukup panjang telah penulis lalui. Setelah menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS REALISASI PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN”**.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan Allah SWT membalas semua amal ibadahnya serta memberikan pahala yang setimpal terhadap bantuan baik secara materil maupun non materil. Amin Ya Rabbal Alamin. Maka dari itu dengan segala ketulusan niat dan kerendahan hati, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda (Muchlis) dan Ibunda tercinta (Yuniar) yang selalu mencurahkan perhatian, merawat, membesarkan serta memberikan semangat, doa dan juga kasih sayang yang tak terhingga kepada Ananda.
2. Adikku Novi Yanti, Ibu & Alm. Ayah, Uncu, Oom, Mak Ranggam, Tante Nunung, Bang Aman & Kak Yanti, Bang Idas, Abang, Kak Ika & Mas Fajar, Aan, Sya-Sya, Fadhil, Nina dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, perhatian dan semangat yang tiada henti.
3. Bapak Rektor Prof. Dr. M. Nazir Karim, MA Selaku Pimpinan, Pembantu Rektor I, II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Mahendra Romus, M.Ec, P.h.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial serta Pembantu Dekan II, dan III.
5. Bapak Drs. Almasri, M.Si yang pernah menjabat sebagai ketua jurusan Administrasi Negara dan saat ini menjabat sebagai Pembantu Dekan I yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi selama perkuliahan.
6. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
7. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara
8. Bapak Mashuri, MA selaku Penasehat Akademik, atas bimbingannya selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima Kasih atas pengertian, bimbingan, waktu, pemikiran serta sarannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

10. Ibu Ratna Dewi, S.Sos, M.Si selaku Penguji I dan Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Penguji II. Terima kasih atas kesediaanya untuk menguji dan memberikan saran untuk skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang sabar dalam memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh Staf Pegawai yang memberikan pelayanan kepada penulis di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial selama perkuliahan
12. Bapak Djunaidy, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dan Seluruh Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yang telah memberikan banyak bantuan dan ilmu selama Praktek Kerja Lapangan serta meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada penulis dalam melakukan penelitian.
13. Belahan jiwaku Saddam Bustanil Yunus yang telah meluangkan banyak waktu baik selama masa perkuliahan maupun dalam masa penyelesaian skripsi. Terima kasih untuk perhatian, motivasi dan kesediaannya untuk selalu berbagi canda, tawa maupun air mata serta selalu hadir dalam masa senang maupun susah dan mengukir banyak kenangan indah selama bersama-sama.
14. Sahabat-sahabat terbaikku Nia, Wulan, Dede, Lina, Amay yang telah mewarnai hari-hariku di Pekanbaru. Banyak hal yang telah terjadi selama kita bersama menghabiskan waktu di kos tercinta, baik suka maupun duka dan banyak kenangan yang tak akan bisa terlupakan. Saling menguatkan ketika

lemah, menjadi sandaran ketika lelah, dan menjadi tonggak untuk berpegang ketika rapuh. Semoga kita selalu bersahabat hingga akhir hayat.

15. Kakak-kakak tersayang, Kak Wiwin dan Kak Mala (alm), yang telah bersedia membimbing, mengingatkan, memberikan kasih sayang, dan bersedia manuntunku ketika aku tidak tau arah. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku.
16. Teman-temanku Irfan, Mas Hery dan Khusnul yang selalu menjadi “si bolang” dadakan untuk acara-acara penting. Terima kasih telah bersedia melawan lelah bersama dan berbagi canda dan tawa.
17. Kepada Efy, Mustika, Nita dan Rika yang sudah menjadi teman terbaikku dari SMA hingga sekarang.
18. Teman-teman ANA B 09 yang sangat mengagumkan, khususnya Reza, Pipin, Vera, Cici, Siti Ijah, Rosi, Adna, Rahmi, Fitri, Beti, Siti Lestari, Meri dan Irma. Mudah-mudahan kita selalu menjadi manusia pembelajar.
19. Seluruh teman seperjuangan Jurusan Administrasi Negara angkatan 2009. Semoga kita sukses dan bisa meraih impian yang telah dicita-citakan.
20. Teman-teman Karimun seperantauan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Roni, Rahmat Adi Gunawan, Okta, Reza, Nuhil, Nur, Santi, Eet dan Badrul.
21. Seluruh pihak yang telah memberikan dorongan, doa, semangat, bantuan dan kerjasama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari standar apalagi kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan tentunya dengan tujuan untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Pekanbaru, 17 Mei 2013

Melda Yunita



## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1   Latar Belakang Masalah.....	1
1.2   Rumusan Masalah .....	5
1.3   Tujuan Penelitian .....	6
1.4   Manfaat Penelitian .....	6
1.5   Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II   LANDASAN TEORI</b> .....	9
2.1   Pengertian Pajak.....	9
2.2   Tujuan dan Fungsi Pajak.....	11
2.3   Syarat Pemungutan Pajak.....	13
2.4   Sistem Pemungutan Pajak .....	16
2.5   Asas Pemungutan Pajak .....	18
2.6   Cara Pemungutan Pajak .....	18
2.7   Pengertian Pajak Daerah .....	19
2.8   Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah.....	21
2.9   Hipotesis.....	24

2.10	Defenisi Konsep .....	24
2.11	Konsep Operasional .....	25
2.12	Kerangka Pemikiran Teoritis .....	27
2.13	Penelitian Terdahulu .....	28
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian .....	33
3.2	Jenis dan Sumber Data .....	33
3.3	Populasi dan Sampel .....	33
3.4	Pengumpulan Data .....	35
3.5	Alat Analisis Data .....	35
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
4.1	Sejarah Singkat Kabupaten Karimun .....	36
4.2	Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.....	40
4.3	Visi dan Misi Dinas Pendapatan Derah Kabupaten Karimun..	41
4.4	Struktur Oeganisasi Dinas Pendapatan Derah Kabupaten Karimun.....	41
4.5	Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Derah Kabupaten Karimun.....	44
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
5.1	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten Karimun.....	54

5.2	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan	
	Target Pajak Daerah Kabupaten Karimun .....	56
5.2.1	Jumlah Hotel .....	58
5.2.2	Jumlah Wisatawan .....	60
5.2.3	Jumlah Pelanggan Listrik.....	65
5.2.4	Jumlah Perusahaan Pertambangan .....	67
5.2.5	Jumlah Petugas Pajak.....	70
5.2.6	Pendapatan Perkapita .....	71
5.2.7	Pertumbuhan Penduduk .....	74
5.3	Upaya-Upaya yang dilakukan Dins Pendapatan Derah Kabupaten Karimun dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Karimun.....	76
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b> .....	82
6.1	Kesimpulan .....	82
6.2	Saran.....	83

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pencapaian Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Karimun Tahun 2007-2011.....	5
Tabel 4.1	Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Karimun.....	38
Tabel 5.1	Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007-2011.....	55
Tabel 5.2	Jumlah Hotel Bintang dan Melati Kabupaten Karimun Tahun 2012.....	58
Tabel 5.3	Jumlah Wisatawan yang Melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun 2007-2011 .....	63
Tabel 5.4	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung Melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Menurut Negara Asal .....	64
Tabel 5.5	Jumlah Pelanggan Listrik dari Tahun 2007-2011 .....	65
Tabel 5.6	Jumlah Perusahaan Pertambangan di Kabupaten Karimun .....	68
Tabel 5.7	Jumlah Pendapatan Perkapita Kabupaten Karimun Tahun 2007-2011 .....	73
Tabel 5.8	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun.....	76

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Sturuktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Karimun..... 43

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional akan tercapai apabila setiap sumber Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai pembiayaan umum pemerintah dan segala kegiatan kenegaraan karena tanpa adanya dana maka segala program dan kegiatan Negara tidak akan bisa dilaksanakan bahkan tujuan pembangunan nasional yang selama ini dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia tidak akan tercapai.

Pendapatan daerah yang berpotensi dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan pendapatan daerahnya karena Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional.

Guna memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu dari Pemungutan Pajak Daerah. Pemungutan Pajak Daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional. Namun semua itu juga dibutuhkan kesadaran dari masyarakat sebagai

wajib pajak atas apa yang dimiliki atau dikelola. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang telah direncanakan dan dicita-citakan.

Dalam hal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber-sumber Penerimaan Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi:
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan
  - d. Lain-lain PAD yang Sah
2. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.
3. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah, meliputi:
  - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - b. jasa giro
  - c. pendapatan bunga
  - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu berasal dari pajak daerah. Berdasarkan UU No. 34 tahun 2000, pajak daerah terbagi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ditetapkan empat jenis pajak Propinsi dan tujuh jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten/kota yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Karimun juga memiliki letak geografis yang strategis karena dekat dengan beberapa Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang menjadikan wilayah Kabupaten Karimun menjadi lintas perdagangan dan pariwisata serta ada pula beberapa perusahaan asing yang berskala internasional yang berdiri di Kabupaten Karimun seperti PT. SAIPEM yang dimiliki oleh Italia dan PT. SUMBAWANG yang dimiliki oleh Singapura.



Dalam Perda Kabupaten Karimun No 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, adapun jenis-jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Galian Bahan Golongan C
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. BPHTB

Begitu besar pajak pendapatan asli daerah yang bisa dimanfaatkan keberadaanya, tentu besaran jumlah pajak yang bisa diambil sudah diperkirakan sebelumnya oleh instansi yang berwenang yang dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah. Besaran pajak yang diperkirakan tersebut dimasukkan kedalam target penerimaan tahunan yang menjadi tugas utama Dinas Pendapatan Daerah dalam mencapainya. Namun, hal berbeda ditunjukkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dengan prestasi pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya yang melebihi dari target. Untuk itu pada penelitian ini akan membahas tentang realisasi pencapaian target pajak daerah Kabupaten Karimun beserta faktor-faktor yang menjadi pendukung bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dalam merealisasikan target pencapaian Pajak Asli Daerah

yang telah ditentukan. Dalam hal ini dapat kita lihat perkembangan pencapaian target penerimaan pajak daerah setiap tahunnya pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Pencapaian Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Karimun Tahun 2007-2011**

Tahun	Target	Realisasi	%
2007	84.298.214.642	126.677.949.716	150
2008	163.522.550.752	235.397.832.286	144
2009	207.455.478.688	241.330.744.506	116
2010	139.642.203.196	177.715.686.788	127
2011	149.812.935.492	186.202.346.190	124

*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun*

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa pencapaian target penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun selalu tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan hingga mencapai 120% pertahun.

Berdasarkan pemikiran dari keadaan tersebut maka penulis memilih judul **“Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada latar belakang di pembahasan sebelumnya dan juga sesuai dengan judul yang akan dianalisis maka dirumuskan beberapa pertanyaan atau masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target terealisasi penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun?

2. Faktor apakah yang memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak daerah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor saja yang dapat mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun
2. Untuk mengetahui faktor apa yang memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak daerah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penelitian tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di pustaka Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya pada jurusan Administrasi Negara.

3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan masukan pemecahan masalah serta dapat dijadikan acuan kepada instansi terkait dalam membuat kebijakan dan mampu memberikan perubahan yang lebih baik terhadap Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.
4. Diharapkan dapat dijadikan referensi atau dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam mempermudah memahami penulisan skripsi ini maka penulis memberi gambaran dari rencana penulisan melalui sistematika penulisan. Penulisan ini dibagi ke dalam beberapa bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini penulis mengawali penelitian yang dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

#### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tentang konsep atau teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan yaitu meliputi pengertian pajak dan pajak daerah.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Dalam Bab ini diuraikan mengenai sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, gambaran struktur organisasi serta aktivitas organisasi.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

**BAB VI : PENUTUP**

Dalam Bab ini merupakan penutup dari skripsi yang berisikan kesimpulan dan perbandingan hasil penelitian dengan teori yang ada dan memberikan saran yang diharapkan berguna bagi obyek penelitian kedepannya.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **1.1 Pengertian Pajak**

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang artinya adalah mewajibkan, mendapatkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan dan lain-lain.

Defenisi pajak menurut Ulama (Gusfahmi, 2007: 31-32):

- a. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.
- b. Gazi Inayah berpendapat pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tnpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan dialokasikan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.
- c. Abdul Qadim Zallum berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H mendefinisikan pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan. (Muhammad Zain, 2007: 11)

Menurut Prof. Dr. P.J. A. Adriani mendefinisikan pajak sebagai: Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah yang dapat membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Muhammad Zain, 2007: 10)

Pengertian atau definisi perpajakan sangat berbeda-beda namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama. Beberapa pengertian mengenai pajak menurut para ahli perpajakan antara lain:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak yang dikemukakan Mardiasmo ini yaitu pendapatan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum adalah berasal dari kas negara. Dimana kas negara yang ada didapat dari iuran rutin rakyat yang dibayarkan kepada negara berdasarkan undang-undang.

Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah:

- a. Iuran masyarakat kepada negara, dimana swasta atau pihak lain tidak boleh memungut
- b. Berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dimana mempunyai kekuatan hukum
- c. Tanpa balas jasa (prestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk.
- d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah
- e. Apabila terdapat surplus dipakai untuk membiayai *public investment*

## **1.2 Tujuan dan Fungsi Pajak**

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara (Nurksel, 1971 dalam Muklis, 2002):

- a. untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi
- b. untuk mendorong tabungan dan menanam modal
- c. untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah
- d. untuk memodifikasi pola investasi



- e. untuk mengurangi ketimpangan ekonomi
- f. untuk memobilisasi surplus ekonomi

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetar* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerrend* (mengatur), (Mardiasmo, 2009: 1):

a. Fungsi *Budgetary* (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetary* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

b. Fungsi *Regulatory* (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Sebagai fungsi *regulatory*, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.

### 1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka harus memenuhi beberapa syarat (Mardiasmo, 2009: 2), yaitu:

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang- undang (syarat yuridis)
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pemungutan pajak dibenarkan hukum karena adanya hubungan kausalitas dari pajak itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak yang dipungut secara langsung ataupun tidak langsung akan kembali digunakan oleh masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan (Mardiasmo, 2009: 2). Ada 5 teori yang mendasari Negara untuk memungut pajak, yang dikutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak karya R. Santoso Brotodihardjo, SH (Herry Porwono, 2010: 5)

- a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari

negara kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini dalam ajarannya yang semula hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang beserta harta bendanya. Teori ini dikenal sebagai *Benefit Approach Theory*.

c. Teori Gaya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak haruslah sama besarnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut

gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Teori ini dikenal sebagai *Ability to Pay Approach Theory*.

d. Teori Bakti (Teori Kewajiban Pajak Mutlak)

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu perkumpulan dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Dari sudut pandang rakyat, membayar pajak kepada negara merupakan bukti rasa baktinya rakyat/warga kepada negaranya.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan melanjutkan kembali kepada masyarakat. Dengan demikian kepentingan masyarakat lebih diutamakan. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik ini sebagai dasar keadilannya. Penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan

kepentingan individu dan bukan pula untuk kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.

#### **1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak (Herry Purwono, 2010: 12):

##### *a. Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

##### *b. Self Assessment System*

Merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Selain itu wajib pajak juga diwajibkan untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

*c. Withholding Tax System*

Merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Apabila dicermati dengan seksama, ketiga sistem ini digunakan secara terintegrasi pada sistem pemungutan pajak di Indonesia. *Self assessment system* berlaku ketika wajib pajak melaksanakan administrasi perpajakan yang menjadi kewajibannya (menghitung, memperhitungkan, dan menyetor pajak terutang). Pada saat yang bersamaan, jika posisi wajib pajak adalah pemungut atau pemotong karena berkedudukan sebagai pemberi kerja atau pihak yang berwenang memungut pajak, maka *Withholding Tax System* juga digunakan. Sedangkan *Official Assessment System* berlaku ketika fiskus melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) atas laporan wajib pajak.

### **1.5 Asas Pemungutan Pajak**

Ada 3 Asas pemungutan pajak yaitu:

a. Asas domisili

Yaitu Negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak tanpa memperhatikan sumber atau objek pajak yang diperoleh atau diterima wajib pajak.

b. Asas sumber

Yaitu pembebanan pajak oleh Negara hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

yaitu bahwa status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak terhadapnya. Perlakuan perpajakan antara warga negara Indonesia dan warga Negara asing itu berbeda.

### **1.6 Cara Pemungutan Pajak**

a. Stesel Riil atau Nyata

Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya, yang benar-benar ada dan dapat ditunjuk. Sebagai contoh, dalam pajak penghasilan, yang dimaksud penghasilan disini adalah penghasilan yang benar-benar didapat atau diterima.

b. Stesel Anggapan

Merupakan pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang dilegalkan oleh Undang-Undang. Contoh, penetapan besaran

angsuran pajak di awal tahun yang didasarkan pada anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun lalu.

c. Stelsel Campuran

Pada dasarnya merupakan gabungan dari dua stelsel yaitu stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan menggunakan stelsel fiktif kemudian pada akhir tahun menggunakan stelsel riil. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan maka wajib pajak harus menambah kekurangannya, sebaliknya apabila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali. Contoh pajak penghasilan.

## **1.7 Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pajak Daerah adalah pajak asli daerah maupun Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah berhubungan dengan tugas dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pajak daerah juga merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh Pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. (UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 tahun 1997).

Menurut Marihot (2005: 10) pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu juga ditetapkan enam jenis pajak Provinsi dan sembilan jenis pajak Kabupaten/Kota.

#### 1. Pajak Provinsi terdiri atas

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas
  - a. Pajak Hotel, Pajak Restoran
  - b. Pajak Hiburan
  - c. Pajak Reklame
  - d. Pajak Penerangan Jalan
  - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - f. Pajak Parkir
  - g. Pajak Air Bawah Tanah
  - h. Pajak Sarang Burung Walet
  - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah

### **1.8 Tolok Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah**

Devas (1989, 101) menyatakan bahwa pajak daerah yang dilaksanakan dapat dinilai dengan menggunakan ukuran-ukuran sebagai berikut:

1. Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungutan.

2. Keadilan (*equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak bersangkutan harus adil dan secara horisontal, artinya baban pajak haruslah sama antar berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Kemudian harus adil secara

vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang lebih sedikit memiliki sumber daya ekonomi.

### 3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai dilihat konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih dari pajak.

### 4. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Revenue Source*)

Dalam hal ini berarti, harus jelas kepada daerah mana suatu pajak haruslah dibayarkan dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan antar daerah dari segi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

### 5. Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*)

Suatu pajak harus dapat dilaksanakan dari sudut kemampuan politik dan tata usaha.

Menurut Mangkoesoebroto menyebutkan bahwa pendapatan menggambarkan ukuran kemampuan seseorang dalam membayar pajak. Sedangkan besar kecilnya penerimaan pajak sangat ditentukan oleh pendapatan

perkapita dan jumlah penduduk (Musgrave and Musgrave, 1989 dalam Sutrisno, 2000: 21). Pada pajak hotel dan restoran faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran adalah harga, pendapatan perkapita, dan jumlah penduduk yang secara spesifik dapat diwakili oleh konsumen hotel dan restoran sebagai subyek pajak (Perda No 19 Tahun 2010) yaitu jumlah wisatawan dan jumlah wajib pajak yaitu jumlah hotel.

Faktor-faktor yang secara spesifik mempengaruhi masing-masing jenis pajak daerah dapat diketahui melalui subyek pajak dan wajib pajak (Perda No 19 Tahun 2010) antara lain sebagai berikut:

1. Pajak hotel dan restoran adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran terhadap hotel dan restoran dan wajib pajak adalah pengusaha hotel. Subyeknya dilihat dari konsumen hotel dimana sebagian besar konsumen hotel adalah wisatawan. Sedangkan obyeknya dapat dilihat dari jumlahnya yaitu jumlah hotel.
2. Pajak hiburan subyeknya adalah orang atau pribadi yang menikmati hiburan yang potensinya dapat dilihat melalui jumlah penduduk.
3. Pajak penerangan jalan obyeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan listrik sehingga dapat dilihat dari jumlah pelanggan listrik.
4. Pajak bahan galian golongan C subyeknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan sehingga dapat dilihat dari jumlah perusahaan pertambangan.

Dari aspek pemungutan yaitu rangkaian kegiatan dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terhutang sampai kegiatan

penagihan serta penyetorannya dilakukan oleh petugas pajak. Jadi jumlah petugas pajak berpengaruh terhadap penerimaan semua jenis pajak.

### **1.9 Hipotesis**

Berdasarkan target-target yang coba dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara sebagai berikut:

“Diduga bahwa jumlah hotel, jumlah wisatawan, jumlah pelanggan listrik, jumlah perusahaan pertambangan, jumlah petugas, pendapatan perkapita dan pertumbuhan penduduk pajak mempengaruhi tingkat penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun”

### **1.10 Defenisi Konsep**

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditujuk, dan yang gunanya adalah yang dapat membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Daerah adalah pajak asli daerah maupun Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah berhubungan dengan tugas dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 1.11 Konsep Operasional

Faktor-faktor yang mempengaruhi jenis-jenis pajak daerah baik secara umum maupun secara spesifik juga mempengaruhi penerimaan pajak daerah karena penerimaan pajak daerah merupakan total penerimaan dari masing-masing jenis pajak daerah. Sehingga dalam penelitian ini digunakan beberapa indikator pokok yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah (Perda No 19 Tahun 2010) antara lain:

1. Jumlah Hotel merupakan prasarana pendukung pariwisata. Para wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah akan menginap di hotel sehingga meningkatkan pendapatan hotel dan pajak hotel pun jadi meningkat yang berpengaruh pada penerimaan pajak hotel.
2. Jumlah Wisatawan adalah jumlah wisatawan asing/domestik yang menginap di hotel berbintang dan hotel melati. Apabila banyak wisatawan yang menginap di hotel maka akan berpengaruh pada pendapatan hotel sehingga pajak hotel meningkat dan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.
3. Jumlah Pelanggan listrik merupakan para pengguna fasilitas tenaga listrik yang disediakan oleh Negara dalam hal ini adalah PT. PLN baik secara perorangan atau rumah tangga, perkantoran dan juga industri. Untuk dapat meningkatkan pajak maka diambil sebuah kebijakan dengan yang fokus pada sarana infrastruktur. Adapun salah satu pajak infrastruktur yang dipilih masyarakat adalah listrik, dalam hal ini adalah pajak penerangan

jalan. Dimana semakin besar penggunaan listrik maka semakin besar pula pajak daerah yang dipungut.

4. Jumlah Perusahaan Pertambangan. Dengan kekayaan hasil tambang yang dimiliki menjadi salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat dan hal ini berhasil menarik minat para investor asing untuk membangun perusahaan pertambangan. Karena di daerah-daerah tertentu hasil tambang memberikan kontribusi yang cukup besar apalagi terhadap pajak daerah.
5. Jumlah petugas pajak merupakan pegawai yang menangani segala proses yang berhubungan dengan pajak mulai dari pemungutan, hingga pengawasannya. Petugas pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam penerimaan pajak daerah hal ini dikarenakan jika jumlah petugas pajak tidak sesuai dengan wajib pajak yang jumlahnya sangat besar maka akan mengalami banyak kendala dalam proses pelayanan. Namun jumlah petugas harus beriringan dengan kualitas personal yang dimiliki pegawai.

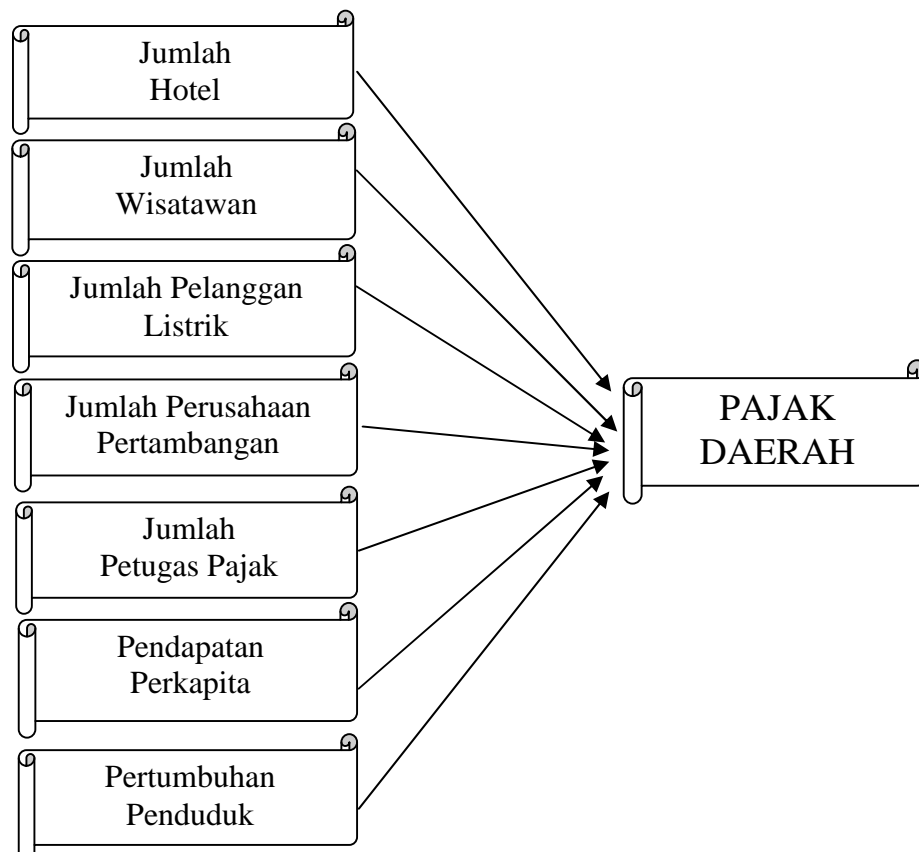
Untuk memperkuat realisasi penerimaan pajak daerah ada beberapa indikator pendukung yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah (Musgrave and Musgrave, 1989 dalam Sutrisno, 2000: 21) antara lain:

1. Pendapatan Perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu wilayah dalam periode tertentu, semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah akan cenderung mendorong meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat maka semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa semakin

tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak pun semakin meningkat.

2. Pertumbuhan penduduk. Penduduk merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah, hal ini dikarenakan penduduk memiliki peran aktif sebagai pelaku pembangunan, semakin besar peranan penduduk dalam pembangunan daerah maka tingkat kualitas kehidupan di daerah tersebut akan meningkat pula. Apabila setiap tahunnya pertumbuhan penduduk semakin maka akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian penduduk. Sehingga kebutuhan penduduk semakin meningkat dan lebih konsumtif.

### 2.12 Kerangka Pemikiran Teoritis





### 2.13 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh para pakar tentang realisasi pencapaian target penerimaan pajak daerah, berikut ini pembahasan yang menjelaskan beberapa hasil penelitian yang diperoleh dari jurnal dan hasil penelitian:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno pada tahun 2002 di kota Semarang tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan data skunder yang di dapatkan dari: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Kabupaten Semarang, Dispenda Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan adalah menggunakan wawancara langsung dengan pegawai dinas terkait, observasi dan dokumentasi dari berbagai publikasi, laporan, buku literatur, majalah, jurnal dan makalah pendukung penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik estimasi regresi.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Faktor yang berpengaruh dominan terhadap penerimaan pajak daerah adalah:
  - 1) Jumlah penduduk
  - 2) Jumlah pelanggan listrik
  - 3) Pendapatan perkapita
  - 4) Jumlah petugas pajak
  - 5) Jumlah wisatawan

- b. Peningkatan pelanggan listrik akan memberikan efek yang besar terhadap peningkatan pajak daerah.
  - c. Peningkatan pendapatan perkapita berpengaruh positif baik terhadap penerimaan pajak hotel dan restaurant maupun terhadap penerimaan pajak parkir.
- 2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Endro Suwarno dan Suhartiningsih tentang Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2008 di Surakarta. Objek dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pemungutan pajak daerah sebagai sumber PAD yang bersumber dari BPKD Kabupaten Sukoharjo. Data yang digunakan adalah data skunder yaitu sejumlah keterangan dan data yang digunakan seseorang dan diperoleh secara tidak langsung, yang berupa target dan realisasi pendapatan daerah kabupaten Sukoharjo yang bersumber dari pemerintah kabupaten Sukoharjo selama tahun anggaran 2003/2004 2007/2008. Metode yang digunakan adalah:
  - a. Analisis **Kualitatif** merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan diskriptif yaitu dengan membandingkan antara peraturan yang berlaku dengan pelaksanaan di BPKD Kabupaten Sukoharjo.
  - b. Analisis **Kuantitatif** merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang berbentuk angka-angka yang dapat dihitung yaitu data realisasi penerimaan pajak daerah dan laporan mengenai pendapatan asli daerah.

- 1) *Menghitung potensi pajak daerah terhadap PAD*. Untuk mengetahui besarnya potensi pajak daerah yang dipungut oleh BPKD kabupaten Sukoharjo selama tahun anggaran 2003/2004 sampai dengan 2007/2008. Potensi pajak daerah tersebut dapat dihitung dengan metode “*least square*”, dengan rumus:

$$Y = a + bx$$

dimana Y adalah nilai variabel yang ingin diketahui (potensi), x adalah periode/waktu, a adalah nilai y apabila  $x=0$ , dan b adalah besarnya perubahan variabel y yang terjadi pada setiap perubahan suatu unit variabel x.

- 2) *Menghitung kontribusi*. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah yang dipungut oleh BPKD kabupaten Sukoharjo selama tahun anggaran 2003/2004 sampai dengan tahun 2007/2008. Besarnya kontribusi pajak daerah tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$Y = \frac{PAD}{TPD} \times 100 \%$$

dimana: Y adalah Prosentase Kontribusi Pajak daerah terhadap PAD, TPD adalah Total Pajak Daerah, dan PAD adalah Pendapatan Asli Daerah

- 3) *Menghitung efektifitas*. Untuk mengetahui keefektifitasan pajak daerah kabupaten Sukoharjo selama tahun anggaran 2003/2004 sampai dengan 2007/2008. Pajak daerah dikatakan efektif jika

efektifitas 100 persen. Efektifitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus (*Abdul Halim*: 2001):

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Target Penerimaan Pajak X}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak X}} \times 100 \%$$

Hasil dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pajak daerah di kabupaten Sukoharjo berpotensi untuk terus digali guna meningkatkan penerimaan daerah, Karena dengan adanya pemungutan pajak daerah pendapatan asli daerah di kabupaten Sukoharjo terus mengalami peningkatan.
2. Kontribusi untuk masing-masing pos pajak daerah mempunyai proporsi yang berbeda beda, dari tujuh pos pajak daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Sukoharjo pos pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pos pajak parkir adalah pos pajak yang memberikan kontribusi paling kecil terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Sukoharjo dimana masing-masing pos memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,07 persen, disusul pos pajak hotel sebesar 0,184 persen, pajak hiburan sebesar 0,186 persen, pajak restoran sebesar 1,112 persen, pajak reklame sebesar 4,966 persen, dan pos pajak daerah yang paling banyak memberikan kontribusinya adalah pos pajak penerangan jalan yaitu sebesar 61,808 persen.
3. Secara keseluruhan pemungutan pajak daerah di kabupaten Sukoharjo sudah efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari 100 persen, namun ada beberapa pajak daerah yang dalam pemungutannya kurang efektif karena mempunyai tingkat efektifitas kurang dari 100 persen

yakni pajak reklame dan pajak pengambilan bahan galian golongan C masing-masing pada tahun 2007/2008.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu dan Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yang berlokasi di Jalan Pertambangan Sungai Ayam Tanjung Balai Karimun. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari – Maret 2013.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi target pencapaian penerimaan pajak daerah di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

2. Data Sekunder

Yaitu data mengenai gambaran umum jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dan jumlah wajib pajak yang diperoleh untuk melengkapi data primer serta tugas dan fungsi pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiono: 2008). Adapun populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yang berjumlah 54 pegawai.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono: 2008). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling* dimana yang menjadi sampel adalah pegawai namun tidak secara keseluruhan hanya sebagian pegawai dari masing-masing bidang saja yang dijadikan sampel. Hal ini dilakukan karena tidak secara keseluruhan pegawai dapat memahami dan menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian penerimaan pajak daerah.

Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian berjumlah 6 orang yaitu:

1. Bapak Djunaidy, S.Sos selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun
2. Bapak Ahmad Yani, SE selaku Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun
3. Ibu Khairani selaku Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun
4. T. Suzan Friana, SE, AK selaku Kasi Perhitungan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun
5. Bapak Firman Zulkhaidi, S.IP selaku Kasi Penetapan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun
6. Bapak Eko Cakraiwanto, SE selaku Staf Bidang Penagihan dan Pembukuan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

### **3.4 Pengumpulan Data**

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian:

a. Observasi

Yaitu dengan cara pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang nampak pada objek penelitian.

b. Wawancara

Yaitu data yang didapat melalui wawancara atau tanya jawab langsung dengan responden sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dilakukan dengan melihat catatan mengenai data-data yang ada hubungannya dengan penelitian.

### **3.5 Alat Analisis Data**

Sesuai dengan metode penelitian, teknis analisis data yang dipergunakan penulis adalah teknik analisis data kualitatif. Analisa kualitatif adalah analisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar dalam menghubungkan data, fakta, dan informasi.



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Karimun**

Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Secara administratif Kabupaten Karimun awalnya merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah II Karimun yang terdiri dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Karimun, Kecamatan Moro dan Kecamatan Kundur.

Setelah terbentuknya DPRD Kabupaten Karimun, melalui Perda Nomor 16 Tahun 2001, maka wilayah Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi 8 kecamatan, yakni:

- a. Kecamatan Karimun dimekarkan menjadi 4 kecamatan :
  1. Kecamatan Karimun
  2. Kecamatan Meral
  3. Kecamatan Tebing
  4. Kecamatan Buru
- b. Kecamatan Kundur dimekarkan menjadi 3 kecamatan :
  1. Kecamatan Kundur
  2. Kecamatan Kundur Utara
  3. Kecamatan Kundur Barat
  4. Kecamatan Moro

Selanjutnya untuk lebih memaksimalkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melalui Perda Nomor 10 tahun 2004, Kecamatan Moro dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Moro dan Kecamatan Durai.

Secara administrasi pemerintah Kabupaten Karimun dikepalai oleh Bupati yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi Kecamatan yang dikepalai oleh Camat, jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun sebanyak 9 Kecamatan dan jumlah Kelurahan sebanyak 22 Kelurahan dan 32 Desa.

Secara keseluruhan Kabupaten Karimun merupakan daerah kepulauan yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 7.984 kilometer persegi yang terdiri dari wilayah daratan seluas 2.784,2 kilometer persegi (34,87%) dan wilayah perairan seluas 5.199,8 kilometer persegi (65,13%). Secara astronomis terletak diantara 00 35' Lintang Utara sampai dengan 10 10' Lintang Utara dan 1030 30' Bujur Timur sampai dengan 1040 00' Bujur Timur, Kabupaten ini berbatasan langsung dengan:

- a. Utara : Selat Malaka dan Singapura,
- b. Selatan: Kecamatan kateman Kabupaten Inhil dan Kabupaten Lingga,
- c. Barat : Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan
- d. Timur : Kotamadya Batam dan Ibu kota Propinsi Kepri Tanjung Pinang.

Hal ini menjadikan letak Kabupaten Karimun sebagai tempat yang strategis karena berada pada jalur utama perdagangan, hotel, dan restoran

merupakan sektor yang paling dominan di Kabupaten Karimun. Dengan demikian Kabupaten Karimun juga termasuk ke dalam salah basis kawasan pertumbuhan IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapur- Growth Triangle).

Jarak Ibu kota Kecamatan yang terjauh dari Ibu kota Kabupaten adalah Kecamatan Durai yang berjarak 62,50 Km, disusul Ibu kota Kecamatan Tg. Batu/Kundur dengan jarak 45,00 Km.

Kecamatan di Kabupaten Karimun berjumlah 9 Kecamatan dengan luas wilayah masing-masing sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Karimun**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )		
		Daratan	Perairan/Laut	Luas Areal
1	Moro	2.516,00	321,14	2.837,14
2	Durai	52,00	1.420,54	1.472,54
3	Tanjung Batu / Kundur	34,30	450,09	484,39
4	Kundur Utara	29,50	509,18	538,68
5	Kundur Barat	21,70	267,12	288,82
6	Karimun	49,90	410,06	459,96
7	Buru	17,80	366,89	384,69
8	Meral	80,00	515,41	595,41
9	Tebing	72,00	796,47	868,47

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun, 2012*

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Karimun memiliki 245 pulau dimana 3 diantaranya merupakan pulau-pulau yang besar, yakni: Pulau Karimun, Pulau Kundur dan Pulau Sugi (Moro). Diantara pulau-pulau tersebut kurang lebih 200 pulau telah bernama dan berpenghuni sedangkan sisanya belum bernama dan berpenghuni. Keunggulan geografis Kabupaten Karimun yang berupa wilayah

kepulauan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadikan daerah ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Daerah ini sebagai pangkalan sarana utama dan pusat pemberantasan penyelundupan yang bernaung dibawah Kanwil II Dirjen Bea Cukai serta sebagai kawasan berikat (bonded zone) khususnya di Pulau Karimun Besar.

Ibukota Kabupaten yaitu Tanjung Balai Karimun, terletak di Pulau Karimun Besar yang merupakan pusat perkembangan daerah ini. Pulau Karimun yang berlokasi di utara berbatasan langsung dengan selat malaka dan Singapura, dengan jarak sekitar 21 mil ke Malaysia dan 28 mil ke Singapura, selain itu daerah ini juga merupakan persinggahan perhubungan laut dari Tanjung Pinang dan Batam ke Pulau Sumatera.

Kabupaten Karimun merupakan wilayah yang relative datar dan landai, dengan ketinggian 2–500 M di atas permukaan laut. Sebagian wilayah Kabupaten Karimun merupakan pegunungan atau perbukitan dengan kemiringan 40° dan ketinggian 20-500 meter di atas permukaan laut, yang terdapat di utara pulau Karimun.

Disamping itu, ada beberapa wilayah Kabupaten Karimun terdapat rawa-rawa. Dilihat dari keberadaan potensi wilayahnya maka wilayah laut (perairan) Kabupaten Karimun merupakan perairan yang subur karena sebagian wilayahnya berada pada Selat Malaka.

Penduduk Kabupaten Karimun berkembang sejalan dengan perkembangan daerah, letak geografis yang strategis serta didukung oleh aksesibilitas transportasi laut yang memadai untuk menghubungkan daerah satu ke daerah lain berdampak

pada tingginya mobilitas penduduk dan perpengaruh terhadap perkembangan permasalahan kependudukan secara umum.

#### **4.2 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun**

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun berlokasi di Jalan Pertambangan Sungai Ayam Tanjung Balai Karimun. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun adalah instansi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati Karimun, yang mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah.

Eksistensi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor 160 Tahun 1999 tanggal 20 Oktober 1999 dan berdasarkan Peratran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun.

Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala Dinas dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, transparasi, dan akuntabilitas publik baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten karimun dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang kepala bidang, 2 (dua) orang kepala sub

bagian, 8 (delapan) orang kepala seksi dan 1 (satu) orang Kepala UPTD, 1 (satu) orang kepala sub bagian UPTD dan 36 (tiga puluh enam) orang pegawai dan 2 (dua) orang tenaga honorer daerah, dan 3 (orang) orang honorer kontrak.

Jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun sebanyak 59 orang yang terdiri dari 41 orang laki-laki dan 18 orang perempuan dengan status kepegawaian dan strata pendidikan mulai dari SLTP hingga S-2.

#### **4.3 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun**

Adapun visi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun adalah “Mengoptimalkan Penerimaan Daerah dan Kualitas Pembiayaan Pembangunan Melalui Pelaksanaan Tugas yang Prima menuju Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing.”

Adapun misi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun adalah:

- a. Meningkatkan penerimaan daerah secara optimal
- b. Meningkatkan kualitas pembiayaan pembangunan
- c. Mewujudkan pelaksanaan tugas yang prima melalui keterpaduan antar sektor publik dan antar pihak

#### **4.4 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun**

Kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun mempunyai tanggung jawab secara berjenjang adapun susunan kepegawaiannya sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub bagian umum dan kepegawaian
  - b. Sub bagian perencanaan dan keuangan
3. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari:
- a. Kasi Penetapan
  - b. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
  - c. Seksi Perhitungan dan Pemeriksaan
4. Bidang Penagihan dan Pembukuan, terdiri dari:
- a. Seksi Penagihan dan Pembukuan
  - b. Seksi Penagihan & Pemeriksaan dan Pengendalian
5. Bidang Bagi Hasil Pendapatan BUMD dan Lain-Lain Pendapatan yang sah, terdiri dari:
- a. Seksi Lain-Lain PAD yang Sah, BUMD dan Legalisasi
  - b. Seksi Legalisasi Surat Berharga dan Pendapatan Lain
6. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari:
- a. Seksi BPHTB
  - b. Seksi PBB
7. UPTD





#### **4.5 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun**

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Karimun, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan melaksanakan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah, uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang pendapatan daerah
2. Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di bidang pendapatan daerah
3. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan
4. Melaksanakan pengelolaan UPTD
5. Melaksanakan kegiatan lain di bidang pendapatan daerah yang ditugaskan oleh Bupati

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidangnya
2. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya

Secara garis besar pelaksanaan tugas pokok masing-masing bagian/bidang adalah sebagai berikut:

### **1. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis administrasi umum, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian dinas, uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan dinas
- b. Melaksanakan pelayanan ketatusahaan surat menyurat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas
- c. Mengelola urusan rumah tangga Dinas
- d. Mengelola urusan kepegawaian di lingkungan Dinas
- e. Menyusun rencana kegiatan Dinas
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas
- g. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Dinas

Sekretaris terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaia mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan Tugas pengelolaan teknis administrasi umum Dinas dan melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas, Melaksanakan Tugas Pokok sebagai berikut:

- 1) Menyusun teknis ketatausahaan Dinas
- 2) Menyusun Surat-menyurat Dinas
- 3) Melayani Surat-menyurat Dinas

- 4) Menyusun Kearsipan surat-menyurat Dinas
  - 5) Melayani Kerumag tanggaan Dinas
  - 6) Melayani perlengkapan Dinas
  - 7) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepegawaian Dinas
  - 8) Memeriksa syarat-syarat kelayakan kenaikan pangkat pegawai Dinas
  - 9) Mengusulkan tindakan pembinaan pegawai Dinas
  - 10) Melaksanakan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang di tugaskan oleh pimpinan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas pengelolaan perencanaan dan keuangan dinas, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana dan pengelolaan keuangan Dinas
  - 2) Melayani keuangan Dinas
  - 3) Mengkoordinasikan penyusunan keuangan dinas dengan Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah
  - 4) Menghimpun dan memeriksa keseluruhan bukti pengeluaran keuangan Dinas
  - 5) Menyusun laporan Keuangan Dinas
  - 6) Menyusun rencana kegiatan DSinas
  - 7) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas

- 8) Melaksanakan tugas lain perencanaan dan keuangan lain yang ditugaskan oleh pimpinan

## **2. Bidang Pendataan dan Penetapan**

- a. Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis operasional pelaksanaan tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Menyusun pedoman teknis operasional pendataan dan penetapan pajak dan retribusi.
- 2) Melaksanakan penerimaan pendataan dan melakukan penetapan pajak dan retribusi daerah
- 3) Melakukan pendataan pendapatan dan penetapan pajak retribusi.
- 4) Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan penerimaan pendapatan dan penetapan
- 5) Melakukan perhitungan penerimaan pendataan
- 6) Melakukan pemeriksaan penerimaan pandataan
- 7) Merumuskan evaluasi dan pelaporan pendataan dan penetapan
- 8) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Unit kerja dan instansi terkait dalam upaya pelaksanaan kegiatan pendapatan dan penetapan pajak dan retribusi
- 9) Melaksanakan tugas lain sejenis yang di tugaskan oleh Kepala Dinas.

b. Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan pendataan dan penetapan, Melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program pendataan dan penetapan.
- 2) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data wajib pajak dan penetapan
- 3) Melaksanakan penetapan wajib pajak dan retribusi
- 4) Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pendataan dan penetapan
- 5) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan pendataan dan penetapan.
- 6) Melaksanakan tugas lain sejenis yang di tugaskan oleh Kepala Bidang

c. Seksi Perhitungan dan pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan perhitungan dan pemeriksaan, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program perhitungan dan pemeriksaan pendataan.
- 2) Melaksanakan perhitungan dan pemerksaan pendataan
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan
- 4) Perhitungan dan pemeriksaan pendataan

- 5) Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan perhitungan dan pemeriksaan pendataan
- 6) Melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan perhitungan dan pemeriksaan pendataan
- 7) Melakukan tugas lain sejenis yang di tugaskan oleh Kepala Bidang

### **3. Bidang Penagihan dan Pembukuan**

- a. Bidang penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis operasional pelaksanaan penagihan dan pembukuan, melaksanakan tugas sebagai berikut:
  - 1) Merencanakan program dan petunjuk teknis operasional penagihan dan pembukuan
  - 2) Melaksanakan penagihan dan menertibkan pembukuan
  - 3) Melaksanakan penyusunan evaluasi penagihan dan pembukuan
  - 4) Melaksanakan pemeriksaan pendapatan dan tertib pembukuan pendapatan
  - 5) Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan penagihan dan pembukuan pendapatan
  - 6) Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pembukuan
  - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

b. Seksi penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan petunjuk teknis operasional pelaksanaan penagihan dan tertib pembukuan pendapatan, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program pelaksanaan penagihan dan tertib pembukuan pendapatan daerah
- 2) Melaksanakan penagihan dan tertib pembukuan pendapatan daerah
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi penagihan dan pembukuan pendapatan daerah
- 4) Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan penagihan dan tertib pembukuan pendapatan daerah
- 5) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja dan instansi lain terutama pihak kecamatan, kelurahan dan desa untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan penagihan pendapatan daerah
- 6) Melakukan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang

c. Seksi pemeriksaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan petunjuk teknis operasional pemeriksaan dengan pengendalian pendapatan daerah, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program pemeriksaan dan pengendalian pendapatan daerah

- 2) Melaksanakan pemeriksaan penagihan dan pengendalian tertib pembukuan
- 3) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan pemeriksaan dan pengendalian penagihan dan pembukuan
- 4) Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pemeriksaan dan pengendalian penagihan
- 5) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan dengan unit kerja dan instansi lain untuk mempermudah pemeriksaan dan pengendalian penagihan
- 6) Melakukan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang

#### **4. Bidang Bagi Hasil Pendapatan**

- a. Bidang bagi hasil pendapatan mempunyai tugas merencanakan penyusunan kebijakan teknis operasional pelaksanaan bagi hasil pendapatan yang menjadi hak daerah, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:
  - 1) Menyiapkan rencana bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak
  - 2) Melakukan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak
  - 3) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak
  - 4) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan bagi hasil pajak dan non pajak



- 5) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan dengan unit kerja dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan tugas bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak
  - 6) Melaksanakan tugas lain sejenis yang di tugaskan oleh Kepala Bidang
- b. Seksi perhitungan bagi hasil pajak dan non pajak mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pelaksanaan perhitungan bagi hasil pajak dan non pajak, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana teknis opsional pelaksanaan perhitungan bagi hasil
  - 2) Melaksanakan perhitungan bagi hasil
  - 3) Melakukan persiapan sarana dan prasarana untuk mempermudah perhitungan bagi hasil
  - 4) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan perhitungan bagi hasil
  - 5) Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh kepala Bidang
- c. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajak dan non pajak, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana teknis opsional pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajak dan non pajak
  - 2) Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pajak dan non pajak

- 3) Melakukan persiapan sarana dan prasarana untuk mempermudah penatausahaan bagi hasil pajak dan non pajak
- 4) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajak dan non pajak
- 5) Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh kepala Bidang

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian tentang Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Karimun, dan diantara faktor-faktor tersebut, faktor manakah yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Karimun, upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah serta hambatan dalam penerimaan pajak daerah yang didapat melalui wawancara serta data skunder sehingga akan diperoleh data yang akurat terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karimun.

#### **5.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten Karimun**

Realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karimun setiap tahunnya selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat baik dan patut dijadikan contoh untuk daerah-daerah lain yang penerimaan pajak daerahnya tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan sebagai motivasi dalam meningkatkan penerimaan pajak di daerahnya. Adapun penerimaan pajak di Kabupaten Karimun dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:



Berdasarkan data penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karimun dapat disimpulkan bahwa selama 5 tahun periode nilai realisasi penerimaan masing-masing jenis pajak selalu lebih tinggi dari pada target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Karimun telah melakukan berbagai upaya dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Karimun, yang salah satunya dengan cara mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Menurut Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengembangan daerah. Berdasarkan tabel 5.1, realisasi pajak daerah yang lebih tinggi dari target menunjukkan nilai terbesar pada tahun 2009 yaitu sebesar 241,3 miliar rupiah jauh dari target yang ditetapkan sebesar 207,4 miliar rupiah atau 116% dari target, paling tinggi dari pada tahun lainnya.

## **5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Target Pajak Daerah Kabupaten Karimun**

Pembangunan daerah diartikan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintah.

Pembangunan daerah membutuhkan dana yang berasal dari pendapatan asli daerah tersebut, semakin besar pendapatan asli daerah yang didapat baik dari pajak daerah dan retribusi daerah maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah serta akan meningkatkan pembangunan daerah.

Kabupaten Karimun sebagai daerah otonom dituntut mampu membiayai pengeluarannya melalui sumber-sumber penerimaan yang ada di daerah tanpa tergantung pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dan diberikan sumber-sumber keuangan untuk membiayai pengeluarannya yang sebagaimana diatur dalam UU No 34 tahun 2000. Berdasarkan data penerimaan pajak daerah dari tahun 2007-2011 yang penulis dapat dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, Kabupaten Karimun memiliki tingkat penerimaan pajak daerah yang tinggi setiap tahunnya bahkan melebihi target pajak yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karimun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah:

1. Jumlah Hotel
2. Jumlah Wisatawan
3. Jumlah Pelanggan Listrik
4. Jumlah Perusahaan Pertambangan
5. Jumlah Petugas Pajak
6. Pendapatan Perkapita
7. Pertumbuhan Penduduk

### 5.2.1 Jumlah Hotel

Prasarana pendukung pariwisata di Kabupaten Karimun adalah hotel yang merupakan tempat menginap wisatawan baik domestik maupun internasional. Di Kabupaten Karimun terdapat 65 hotel yang terdiri dari hotel bintang empat, hotel bintang dua dan hotel kelas melati dengan jumlah kamar secara keseluruhan 1606 kamar yang tersebar di 5 kecamatan. Jumlah hotel ini telah cukup untuk menampung jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Karimun setiap tahunnya. Namun jumlah hotel tersebut selalu berubah setiap tahunnya karena ada hotel-hotel yang melaporkan tutup usaha namun ada juga hotel-hotel yang baru dan berkembang karena melihat potensi yang bisa dimanfaatkan dari tingginya jumlah wisatawan yang membutuhkan jasa penginapan. Maka dari itu saat ini pengusaha hotel berlomba-lomba meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan hotel guna menarik minat wisatawan untuk menggunakan jasa kamar hotel mereka.

**Tabel 5.2 Jumlah Hotel di Kabupaten Karimun Tahun 2012**

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Jumlah Hotel</b>	<b>Jumlah Kamar</b>
Kecamatan Tebing	4	260
Kecamatan Meral	1	52
Kecamatan Karimun	41	527
Kecamatan Kundur	16	719
Kecamatan Moro	3	48
<b>Total Jumlah</b>	<b>65</b>	<b>1606</b>

*Sumber: Data Olahan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, 2013*

Dengan demikian untuk melihat keterkaitan jumlah hotel dalam meningkatkan pajak daerah di Kabupaten Karimun maka penulis melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan yaitu Ibu Khairani yang mengatakan bahwa:

*“Pada dasarnya jumlah hotel bukan mutlak menjadi salah satu penyumbang penerimaan pajak hal ini dikarenakan banyaknya jumlah hotel namun tidak ada pengunjung yang menginap tidak dapat dipungut pajaknya, karena penerimaan pajak tergantung pendapatan dari hotel itu sendiri. Namun berbeda yang terjadi pada Kabupaten Karimun, hotel memiliki peran yang cukup penting dalam peningkatan penerimaan pajak daerah. Hal ini mengingat tingginya jumlah wisatawan yang berkunjung setiap tahunnya yang membutuhkan jasa penginapan dan hotel. Selain wisatawan, penduduk lokal juga menggunakan jasa hotel, hal ini disebabkan Kabupaten Karimun yang terdiri dari pulau-pulau yang jarak tempuhnya membutuhkan berjam-jam maka penduduk sekitar yang memiliki keperluan di pulau lain lebih cenderung memilih menginap di hotel karena tidak ada transportasi yang melayani 24 jam.”(13 Februari 2013)*

Dari hasil wawancara di atas penulis berkesimpulan bahwa jumlah hotel yang ada di Kabupaten Karimun cukup menunjang dalam peningkatan penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan hotel adalah salah satu sarana yang dibutuhkan di Kabupaten Karimun tidak hanya sebagai tempat menginap bagi para wisatawan tetapi juga banyak digunakan oleh penduduk



lokal hal ini dikarenakan Kabupaten Karimun terdiri dari beberapa wilayah yang tersebar di beberapa pulau yang terpisah, sehingga apabila masyarakat di pulau-pulau tersebut memiliki urusan baik untuk berdagang, tugas kedinasan pemerintah ataupun untuk wisata yang tidak memungkinkan untuk pulang sewaktu-waktu, maka mereka akan mencari penginapan baik wisma ataupun hotel.

### **5.2.2 Jumlah Wisatawan**

Wisatawan adalah orang yang melakukan suatu perjalanan ke daerah lain dalam rangka untuk melakukam liburan atau tujuan rekreasi. Yang dapat dikatakan sebagai wisatawan adalah (Winarti, 2003: 41):

- a. Mereka yang melakukan perjalanan untuk kesenangan karena alasan keluarga, kesehatan dan lain-lain.
- b. Mereka yang melakukan perjalanan untuk melakukan pertemuan-pertemuan atau karena tugas-tugas tertentu.
- c. Mereka yang melakukan perjalanan dengan tujuan usaha.
- d. Mereka yang melakukan perjalanan dengan kapal laut walaupun tinggal disuat daerah kurang dari 24 jam.

Kegiatan-kegiatan wisatawan dapat merupakan gambaran praktis masuknya devisa melalui industri pariwisata sebagai berikut:

- a. Penerimaan *visa fee* sewaktu akan berangkat ke negara tujuan di kedutaan besar dan konsulat Negara yang bersangkutan, berlaku kepada wisatawan asing.

- b. Hasil penjualan tiket dari alat transportasi yang digunakan wisatawan untuk datang berkunjung baik saat pulang dan pergi.
- c. Biaya transportasi ketika berada di daerah tujuan wisata seperti, taksi, bus atau ojek motor.
- d. Sewa kamar hotel selama menginap di daerah tujuan wisata.
- e. Pengeluaran wisatawan untuk makan dan minum pada restoran baik di dalam maupun di luar hotel mereka menginap.
- f. Pengeluaran untuk membeli barang-barang souvenir serta barang-barang lainnya.

Jumlah wisatawan yang berkunjung pada objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Karimun semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini seiring semakin banyaknya objek wisata yang dibuka. Pengeluaran wisatawan selama dalam perjalanan wisata merupakan sumber penerimaan pajak daerah seperti wisatawan yang menginap di hotel akan meningkatkan penerimaan hotel yang secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak hotel begitu juga pada pajak restoran dan pajak hiburan.

Secara teoritis semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, semakin banyak uang yang dikeluarkan di daerah tujuan tersebut. Maka diharapkan menyebabkan peningkatan pendapatan pajak daerah, baik melalui pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Untuk mengetahui bagaimana keterkaitan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Karimun dalam peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah maka penulis mewawancarai Kepala Seksi Penetapan Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Karimun yaitu Bapak Firman Zulkhaidi, S.IP yang mengatakan bahwa:

*“Wisatawan merupakan salah satu penyumbang penerimaan pajak daerah namun besar kecilnya penerimaan pajak tergantung dari banyaknya jumlah wisatawan dan lama mereka menetap di suatu objek wisata. Semakin lama wisatawan menetap maka semakin besar pula pengeluaran yang mereka lakukan untuk pemenuhan kebutuhan, baik makan dan minum, menggunakan alat transportasi, penggunaan jasa hotel, pembelian oleh-oleh dan lain hal sebagainya. Kesemua dari aktivitas ini akan menambah jumlah pendapatan daerah. Pada beberapa tahun terakhir jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Karimun terus meningkat dari tahun ke tahun baik wisatawan domestik maupun internasional. Peningkatan wisatawan ini dikarenakan bertambahnya objek-objek wisata yang mampu menarik minat wisatawan.” (13 Februari 2013)*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan jumlah wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya di Kabupaten Karimun berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata tersebut maka tingkat hunian kamar hotel juga meningkat, jumlah orang yang makan di restoran juga meningkat baik restoran di hotel maupun di luar hotel, serta pengunjung tempat hiburan juga bertambah seperti diskotik dan pub atau bar. Maka dengan demikian maka tercapainya target pajak daerah serta

meningkatnya realisasi pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dikarenakan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Karimun karena tertarik pada objek-objek wisata yang dimiliki Kabupaten Karimun.

Untuk mengetahui jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Kabupaten Karimun dari tahun 2007 sampai tahun 2011 dapat dilihat tabel di bawah berikut:

**Tabel 5.3 Wisatawan Yang Melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun 2007-2011**

No	Tahun	Jumlah Wisatawan
1	2007	104.397
2	2008	100.908
3	2009	101.632
4	2010	136.322
5	2011	152.463

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun 2012*

Pada tabel di atas wisatawan yang datang ke Kabupaten Karimun pada tahun 2007 sebanyak 104.397 orang wisatawan, pada tahun 2008 wisatawan yang berkunjung berjumlah 100.908 orang wisatawan, pada tahun 2009 jumlah wisatawan yang berkunjung berjumlah 101.632, pada tahun 2010 jumlah wisatawan yang berkunjung meningkat drastis menjadi 136.322 orang wisatawan dan jumlah ini terus meningkat tajam pada tahun 2011 dengan jumlah wisatawan yang berkunjung 152.463 orang wisatawan.

Wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Karimun selalu meningkat dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa semakin

berkembangnya Kabupaten Karimun sebagai kota tujuan wisata, pada tahun 2011 tercatat ada 152.463 wisatawan mancanegara yang datang, angka tersebut terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun puncak kunjungan wisatawan asing ke Kabupaten Karimun mulai dari bulan Maret, Juni, Juli dan Desember yang merupakan hari-hari libur panjang di Negara asal wisatawan mancanegara. Untuk melihat jumlah wisatawan asing yang berkunjung melalui pelabuhan Tanjung Balai Karimun menurut Negara asal wisatawan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 5.4 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung Melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Menurut Negara Asal**

Asal Negara	Jumlah Wisatawan	Persentase (%)
Singapura	69.592	37,01
Jepang	99	0,09
Malaysia	80,714	58,22
Australia	77	0,07
Taiwan	126	0,12
Korea Selatan	69	0,07
Amerika Serikat	53	0,05
Inggris	131	0,13
Philipina	441	0,42
Thailand	286	0,27
India	1.206	1,16
China	371	0,36
Lainnya	2.128	2,04
Jumlah	151.463	100

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun, 2012*

Dari tinjauan data tabel di atas pada tahun 2011 wisatawan mancanegara terbesar datang dari Negara Malaysia yang berjumlah 80.714 orang wisatawan. Hal ini dikarenakan dekatnya jarak antara Kabupaten Karimun dengan Malaysia yang hanya berjarak kurang lebih 45 menit melalui jalur laut, begitu juga dengan jumlah wisatawan mancanegara terbanyak kedua dari Singapura yang berjumlah 69.592 orang wisatawan. Kedua Negara tersebut letak geografisnya sangat dekat dengan Kabupaten Karimun. Dengan demikian wisatawan yang datang berkunjung ke Kabupaten Karimun memiliki dampak yang baik bagi peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah.

### 5.2.3 Jumlah Pelanggan Listrik

Pelanggan listrik adalah para pengguna fasilitas tenaga listrik yang disediakan oleh Negara dalam hal ini adalah PT. PLN baik secara perorangan atau rumah tangga, perkantoran dan juga industri. Penggunaan daya listrik setiap tahunnya di Kabupaten Karimun mencapai., dan data penambahan rekening listrik baru.

**Tabel 5.5 Jumlah Pelanggan Listrik dari Tahun 2007-2011**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pelangan Listrik</b>
2007	19.307
2008	20.003
2009	20.221
2010	21.662
2011	24.918

*Sumber: Kantor PLN Kabupaten Karimun, 2012*

Banyaknya daya listrik yang digunakan di Kabupaten Karimun baik untuk keperluan rumah tangga maupun industri maka semakin besar pula jumlah pajak yang dapat dipungut dari setiap penggunaan daya listrik tersebut yang dalam hal ini adalah pajak penerangan jalan yang berjumlah sepuluh persen dari jumlah total penggunaan daya listrik yang harus dibayar oleh pelanggan listrik Negara.

Pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai jual tenaga listrik ditetapkan dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan. Tarif pajak penerangan jalan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Untuk mengetahui apakah pengguna daya listrik dapat meningkatkan realisasi penerimaan target pajak daerah maka penulis melakukan

wawancara kepada Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yaitu Bapak Ahmad Yani, SE yang mengatakan bahwa:

*“Jumlah pelanggan listrik yang ada di Kabupaten Karimun cukup tinggi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, jika di kalkulasikan jumlah penggunaan pembayaran listrik dengan 10% yang merupakan pajak penerangan jalan maka hasilnya sangat besar, namun harus di garis bawahi bahwa yang mengelola jumlah pembayaran pajak penerangan jalan adalah wewenang dari PLN yang merupakan penyedia jasa listrik yang kemudian setelah melalui tahap perhitungan baru diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah. Berdasarkan hal ini maka Dinas Pendapatan Daerah hanya menerima berapapun dana yang diserahkan kepada kami.”(12 Februari 2013)*

Dari hasil wawancara tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa Jumlah pelanggan listrik yang terus tumbuh setiap tahunnya memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah khususnya pajak penerangan jalan, namun jumlah pelanggan listrik tidak terlalu memberikan dampak yang luar biasa terhadap realisasi penerimaan target pajak daerah.

#### **5.2.4 Jumlah Perusahaan Pertambangan**

Hasil tambang adalah kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh daerah. Pada Kabupaten Karimun Hasil Tambang adalah salah satu kekayaan alam yang diberikan oleh Allah S.W.T dengan berlimpah. Dengan kekayaan hasil tambang yang dimiliki tersebut menjadi salah satu sumber



penghidupan bagi masyarakat dan hal ini berhasil menarik minat para investor asing untuk membangun perusahaan pertambangan di Kabupaten Karimun. Untuk saat ini tercatat ada 24 perusahaan yang memanfaatkan hasil bumi Karimun, perusahaan tersebut terdiri dari perusahaan milik investor asing dan milik masyarakat.

Untuk melihat lebih jelas jumlah perusahaan tambang dan jenis hasil yang di tambang dapat di lihat pada tabel di bawah sebagai berikut:

**Tabel 5.6 Jumlah Perusahaan Pertambangan di Kabupaten Karimun**

<b>Jenis Hasil Tambang</b>	<b>Nama Perusahaan</b>
GRANIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Pacific Granitama</li> <li>2. PT. Aneka Mining Sukses</li> <li>3. PT. Bukit Granit Mining Mandiri</li> <li>4. PT. Tri Megah Perkasa Utama</li> <li>5. PT. Riau Alam Anugerah Indonesia</li> <li>6. PT. Kawasan Dinamika Harmonitama</li> <li>7. PT. Wira Penta Kencana</li> </ol>
PASIR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPR. Pasir Laut “RM”</li> <li>2. Koperasi Nelayan Tradisional</li> <li>3. Noor Idris</li> <li>4. IKB. Teluk Paku</li> <li>5. KPR. Pasir Putih</li> <li>6. Syarifudin</li> <li>7. P.R.E.A</li> <li>8. KPR. Baitul Makmur Akbar</li> <li>9. PR. Pasir Laut Muhammad Sukri</li> <li>10. PR. Pasir LAut Muhammad Zakaria</li> <li>11. R. Iskandar Alamsyah</li> <li>12. PT. Perintis Moro Aditya</li> </ol>
TANAH URUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Bali Jaya Karimun</li> <li>2. CV. Riau Ananda</li> <li>3. CV. Karya Kreasi Karimun</li> <li>4. Karimun Agung</li> <li>5. PT. Karimun Bahagia</li> </ol>

*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, 2012*

Untuk mengetahui pengaruh berlimpahnya kekayaan alam hasil tambang yang dimiliki Kabupaten Karimun dalam kontribusinya untuk peningkatan penerimaan pajak daerah khususnya melalui pajak bahan galian golongan C. Maka penulis mewawancarai Kepala Dinas Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yaitu Bapak Djunaidy, S.Sos yang mengatakan bahwa:

*“Hasil tambang yang ada di Kabupaten Karimun merupakan anugrah yang luar biasa yang kita miliki karena hasil tambang adalah penyumbang pajak daerah tertinggi setiap tahunnya, pada umumnya hasil tambang yang dihasilkan dari Kabupaten Karimun diproduksi untuk di ekspor ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Meski demikian penerimaan pajak dari pertambangan tergolong berfluktuatif yang setiap tahunnya mengalami pasang surut. Hal ini dikarenakan pengenaan pajak pada hasil tambang dipungut bukan berdasarkan berapa yang bisa di produksi oleh perusahaan-perusahaan tambang tetapi berdasarkan hasil penjualan yang bisa mereka capai.” (12 Februari 2013)*

Dari hasil wawancara diatas penulis berkesimpulan bahwa perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Karimun memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan pajak daerah setiap tahunnya. Namun hasil penerimaan pajak dari hasil tambang cenderung mengalami naik turun setiap tahunnya dikarenakan penjualan hasil tambang yang juga tidak stabil. Pajak yang dikenakan pada hasil tambang cukup

besar yaitu mencapai 25% dari hasil penjualan hasil tambang. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatakan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan yang paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### **5.2.5 Jumlah Petugas Pajak**

Petugas pajak adalah pegawai yang menangani segala proses yang berhubungan dengan pajak mulai dari pemungutan, hingga pengawasannya. Untuk mengetahui apakah jumlah petugas pajak berpengaruh terhadap peningkatan realisasi target penerimaan pajak daerah maka penulis melakukan wawancara pada Staf Bidang Penagihan dan Pembukuan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yaitu Bapak Eko Cakraiwanto, SE yang mengatakan bahwa:

*“Jumlah petugas pajak tentu sangat berpengaruh terhadap realisasi target penerimaan pajak daerah, apabila suatu daerah memiliki potensi pajak daerah yang baik namun tidak didukung dengan jumlah dan keterampilan petugas pajaknnya maka potensi tersebut tidak akan dapat di maksimalkan bahkan menjadi sia-sia. Dalam peningkatan penerimaan pajak daerah, petugas pajak tidak hanya dilihat dari jumlah tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dan memiliki kemampuan di bidangnya. Untuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun jumlah petugas pajak sudah cukup memadai dalam jumlah yaitu 65 orang pegawai yang ada pada Kantor Dinas Pendapatan*

*Kabupaten Karimun, jumlah tersebut sudah cukup mampu untuk melayani jumlah wajib pajak yang ada di Kabupaten Karimun.”(12 Februari 2013)*

Dari hasil wawancara di atas penulis berkesimpulan bahwa jumlah petugas pajak mempengaruhi dalam peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah hal ini dikarenakan petugas pajak merupakan pioner utama dalam penerimaan pajak daerah apabila petugas pajak tidak mencukupi dalam jumlah maka proses pemungutan pajak akan berjalan sangat lama yang secara otomatis tidak akan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada setiap wajib pajak yang datang untuk membayar pajak mereka, hal ini akan membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak yang akan berujung pada rendahnya penerimaan pajak daerah.

Kabupaten Karimun adalah daerah yang memiliki sumber-sumber pendapatan yang sangat potensial, hal ini didukung dengan jumlah petugas pajak yang memadai yang mampu memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak sehingga membuat wajib pajak dengan sendirinya memiliki kesadaran untuk membayar pajak-pajak mereka sehingga berdampak pada tercapainya setiap target pajak yang ditentukan setiap tahunnya.

#### **5.2.6 Pendapatan Perkapita**

Pendapatan masyarakat menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluaran termasuk untuk membayar pajak. Semakin besar tingkat pendapatan masyarakat mempunyai pengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu wilayah dalam periode tertentu, semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah akan cenderung mendorong meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat maka semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak pun semakin meningkat.

Pada Kabupaten Karimun pendapatan perkapita terus mengalami peningkatan seiring berkembangnya perekonomian masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan perkapita Kabupaten Karimun maka akan meningkatkan pola konsumtif masyarakat yang secara otomatis akan berpengaruh pada peningkatan pajak daerah. Untuk mengetahui apakah pendapatan perkapita berpengaruh dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karimun maka penulis mewawancarai pegawai Bidang Pendataan dan Penetapan, Seksi Perhitungan dan Pemeriksaan yaitu ibu T. Suzan Friana, SE.Ak yang mengatakan:

*“Jumlah pendapatan perkapita mempunyai andil yang cukup besar dalam penerimaan pajak daerah karena semakin tingginya pendapatan yang diterima masyarakat maka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan akan semakin beragam. Dengan tingginya pendapatan, masyarakat lebih cenderung melakukan konsumsi yang berlebih seperti*

*makan di restoran dan pergi ke tempat hiburan maka akan meningkatkan pendapatan dari pengusaha yang bersangkutan otomatis meningkatkan jumlah pajak mereka.”(12 Februari 2013)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi penghasilan yang diterima masyarakat maka akan merubah pola kehidupan masyarakat yang menjadi lebih konsumtif terhadap pemenuhan kebutuhannya. Setelah kebutuhan primer terpenuhi masyarakat cenderung berusaha memenuhi kebutuhan sekunder bahkan tersier mereka yang tentunya akan menyumbang pada penerimaan pajak daerah.

Untuk mengetahui tingkat pendapatan perkapita pada Kabupaten Karimun dapat dilihat tabel di bawah ini:

**Tabel 5.7 Jumlah Pendapatan Perkapita Kabupaten Karimun Tahun 2007-2011**

Tahun	Pendapatan Regional Perkapita
2007	7.849.861,03
2008	8.161.788,39
2009	8.513.392,20
2010	8.922.098,28
2011	9.087.541,01

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun, 2012*

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa setiap tahunnya pendapatan perkapita di Kabupaten Karimun mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat pada tahun 2007 pendapatan

perkapita berjumlah 7.849.861 juta rupiah perkapita pertahun, tahun 2008 meningkat menjadi 8.161.788 juta rupiah perkapita pertahun, tahun 2009 peningkatan 8.513.392 juta rupiah perkapita pertahun, tahun 2010 kembali meningkat menjadi 8.922.098 juta rupiah perkapita pertahun dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 9.087.541 juta rupiah pertahun.

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Karimun selalu meningkat setiap tahunnya dimana akan berlaku teori ekonomi semakin besar pendapatan maka akan semakin besar pula pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tak terbatas.

### **5.2.7 Pertumbuhan Penduduk**

Penduduk merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah, hal ini dikarenakan penduduk memiliki peran aktif sebagai pelaku pembangunan, semakin besar peranan penduduk dalam pembangunan daerah maka tingkat kualitas kehidupan di daerah tersebut akan meningkat pula.

Tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karimun dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat akan berpengaruh kepada meningkatnya pertumbuhan perekonomian penduduk di Kabupaten Karimun.

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010 dan proyeksi penduduk 2011, jumlah penduduk Kabupaten Karimun pada 2 tahun terakhir meningkat dari 212.561 jiwa pada tahun 2010 menjadi 223.397 jiwa

pada tahun 2011. Dengan demikian, selama periode tersebut jumlah penduduk bertambah 10.836 jiwa dengan kenaikan rata-rata sebesar 5,10% pertahun.

Berdasarkan data tersebut, untuk melihat sejauh mana peran pertumbuhan penduduk dalam menyumbang penerimaan pajak daerah Kabupaten Karimun maka penulis mewawancarai Sekretaris Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yaitu Bapak Ahmad Yani, SE untuk menunjang keterkaitan penduduk terhadap peningkatan pajak daerah, yang mengatakan:

*"Pertumbuhan penduduk memiliki kontribusi dalam peningkatan penerimaan pajak daerah karena akan semakin banyak jumlah subjek pajak, apalagi diiringi dengan peningkatan pendapatan perkapita. Semakin banyak penduduk, semakin banyak pula yang membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga tingkat penghasilan masyarakat semakin bertambah dan semakin banyak pula potensi pajak yang terdapat di dalamnya seperti semakin banyaknya orang yang pergi ke tempat objek-objek wisata, semakin tinggi kebutuhan untuk makan dan minum, semakin banyaknya alat jumlah alat transportasi yang diperlukan." (12 Februari 2013)*

Dari hasil wawancara di atas penulis berkesimpulan bahwa pertumbuhan penduduk erat kaitannya dengan peningkatan penerimaan pajak daerah. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin besar pula



potensi pajak yang dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan semakin banyak orang yang mau makan ke restoran, semakin banyak orang yang melakukan perjalanan wisata, menginap di hotel ketika mereka berwisata, banyak bermunculan tempat-tempat wisata baru dan semakin banyak pula orang pergi ke tempat hiburan yang dimana keseluruhan aktifitas tersebut terkena pajak atas pengusahanya.

**Tabel 5.8 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun**

<b>Tahun</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
2007	109.625	106.596	216.221
2008	117.941	105.937	223.878
2009	119.871	111.787	231.658
2010	108.923	103.638	212.561
2011	141.271	131.712	272.985

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun, 2012*

Dari tabel diatas terlihat kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya di Kabupaten Karimun. Pada tahun 2007 jumlah penduduk berjumlah 216.221 jiwa, pada tahun 2008 berjumlah 223.878 jiwa, pada tahun 2009 berjumlah 231.658 jiwa, pada tahun 2010 meningkat sebanyak 212.561 jiwa dan pada tahun 2011 menjadi 272.985 jiwa.

### **5.3 Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Karimun**

Pajak Daerah merupakan penyumbang pendapatan asli daerah yang berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Karimun, dalam hal ini Kantor Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi yang berwenang dalam pemungutannya telah mampu bekerja dengan sangat baik. Hal ini terlihat dengan

meningkatnya penerimaan pajak daerah setiap tahun. Keberhasilan tersebut tidaklah dapat dicapai tanpa adanya kerja keras dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yang didukung dengan pegawai yang memiliki kemampuan yang kompeten dalam bidangnya masing-masing. Dalam mencapai keberhasilan tersebut banyak upaya yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah penulis melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yaitu Bapak Djunaidy, S.Sos yang mengatakan:

*“Dalam rangka pencapaian penerimaan target pajak daerah, banyak upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dengan mengerahkan seluruh kemampuan sumber daya manusia yang kita miliki untuk dapat maksimal dalam melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing. Kemudian petugas lapangan giat dalam melakukan sosialisasi di berbagai media, pengawasan untuk mengetahui apakah sesuai pajak yang dibayar oleh wajib pajak, melakukan pendataan terhadap objek pajak yang baru, apabila terjadi keterlambatan dalam membayar pajak petugas akan mengirim surat peringatan kepada wajib pajak. Selain itu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun juga memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat dalam membayar pajak. (12 Februari 2013)*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan, ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, seperti terlihat pada kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, antara lain sebagai berikut:

1. Giat melakukan Intensifikasi terhadap objek pajak mulai dari pendataan, penetapan, pemungutan dan pengawasan.
2. Melakukan sosialisasi atau propaganda terhadap para wajib pajak yaitu dengan memberikan penyuluhan rutin terhadap masyarakat yang menjadi wajib pajak, pemasangan baliho dan spanduk tentang wajib membayar pajak.
3. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yaitu dengan melakukan workshop, traning dan retraining
4. Melakukan pengawasan terhadap objek pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak, ini sangat berguna untuk memeriksa kesesuaian pajak yang dibayar dengan kondisi objek pajak yang sebenarnya dan untuk menghindari kecurangan wajib pajak. Hal dilakukan karena Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun telah menggunakan *Self Assessment System* yang merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sehingga melalui sistem ini

administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

5. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak ini merupakan sebuah apresiasi dan upaya yang dilakukan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun untuk memberikan semangat dan memotivasi wajib pajak agar taat dalam membayar pajaknya dan berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak dilakukan dalam bentuk piagam hal ini berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 2012, Seperti yang baru-baru ini dilakukan Kantor Dinas Pendapatan Daerah yang menyelenggarakan acara penyerahan penghargaan kepada wajib pajak teladan yang terdiri dari beberapa kategori dan dipilih oleh tim penilai dan pengawas. Adapun kategori dan pemenangnya adalah:

1. Untuk Pajak Hotel

- a. PT. Island Connection meraih wajib pajak teladan I
- b. Hotel Padi Mas yang berganti nama menjadi Hotel Aston sebagai wajib pajak teladan II
- c. Hotel Maximillian wajib pajak teladan III.

2. Untuk Pajak Restoran/Rumah Makan

- a. Restoran Mc. Dota wajib pajak teladan I
- b. Restoran Holiday teladan II
- c. Rumah Makan Suka Maju teladan III.

### 3. Pajak Hiburan

- a. Diskotek Bravo sebagai wajib pajak teladan I
- b. Karaoke Hotel Paradise teladan II
- c. Karaoke Hotel Satria teladan III.

### 4. Untuk Pajak Reklame

- a. CV. Gen Perkasa sebagai wajib pajak teladan I
- b. PT. Bank BNI (persero) Tbk cabang Tanjung Balai Karimun teladan II
- c. PT. Semesta Abadi Motor teladan III

### 5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- a. PT. Wira Penta Kencana teladan I
- b. PT. Bukit Granite Mining Mandiri teladan II
- c. PT. Aneka Mining Sukses teladan III

Dalam pelaksanaan dan realisasi upaya-upaya yang dilakukan Kantor Penerimaan Pajak Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pasti terdapat hambatan-hambatan yang menghalang pelaksanaan upaya peningkatan penerimaan pajak daerah. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dalam melakukan peningkatan penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Karena banyaknya investor asing maupun investor luar kota yang membuka usaha di Kabupaten Karimun membuat kesulitan bagi pegawai lapangan untuk melakukan pendataan objek pajak karena wajib pajak yang

bersangkutan tidak berdomisili tetap di Kabupaten Karimun melainkan hanya menjalankan usahanya di Kabupaten Karimun.

2. Bagi sebagian wajib pajak kurang memiliki kesadaran untuk memberikan laporan kepada Kantor Dinas pendapatan Daerah baik yang baru membuka usaha ataupun yang telah tutup usaha sehingga mengakibatkan kurang akuratnya data dalam penerimaan pajak daerah.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai analisis realisasi target penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karimun, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam peningkatan penerimaan pajak daerah pada Kabupaten Karimun adalah:
  1. Pendapatan perkapita
  2. Pertumbuhan penduduk
  3. Jumlah hotel
  4. Jumlah wisatawan
  5. Jumlah pelanggan listrik
  6. Jumlah perusahaan pertambangan
  7. Jumlah petugas pajak
2. Faktor dominan yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Karimun adalah jumlah perusahaan pertambangan dimana terdapat 24 perusahaan pertambangan yang tercatat pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yang masih aktif. Hal ini didukung sumber kekayaan alam yang melimpah dalam industri pertambangan. Pemanfaatan hasil tambang diatur dalam pajak galian bahan golongan C dimana dikenakan pajak sebesar 25% dari hasil penjualan hasil tambang. Jumlah kontribusi yang dihasilkan dari sektor pertambangan sangat besar

setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 5.1 penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karimun Tahun 2007-2011.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, beberapa upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karimun antara lain:

1. Membuat berbagai kemudahan bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Karimun sehingga memberikan dampak positif bagi pendapatan masyarakat yang pada gilirannya akan berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah itu sendiri.
2. Perlunya upaya-upaya untuk menarik wisatawan agar berkunjung di Kabupaten Karimun. Upaya untuk menarik wisatawan tersebut dapat dilakukan antara lain melalui pembanahan tempat-tempat wisata, pembanunan tempat-tempat wisata baru, menggalakkan promosi, melakukan kerjasama dengan biro-biro perjalanan, melakukan pembinaan terhadap pengusaha hotel dan restaurant.
3. Sudah dilakukannya pemberlakuan sistem pemungutan pajak daerah dengan cara wajib pajak menghitung pajaknya sendiri sudah sangat baik untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, namun perlu dilakukan pengawasan dan pengecekan di tempat wajib pajak dan memberikan sanksi yang tegas bila terdapat indikasi kecurangan dalam pembayaran pajak, sehingga menimbulkan efek jera



baik bagi pelanggar maupun bagi wajib pajak yang lain. Namun langkah ini perlu dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.

4. Terus menghimbau wajib pajak apabila terjadi keterlambatan pembayaran pajak, mulai dari menyampaikan surat SPTPD hingga turun langsung ke lapangan untuk meninjau langsung.
5. Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karimun sudah sangat baik sehingga perlu di pertahankan jika perlu di lakukan peningkatan setiap tahunnya .
6. Melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak untuk memberikan informasi akan wajibnya membayar pajak dan manfaat dari membayar pajak terhadap perkembangan daerah.
7. Terus melakukan pendataan terhadap wajib pajak baru dan wajib pajak yang telah terdaftar untuk menghindari penurunan penerimaan pajak daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Agustinus, Soni dan Isnianto Kurniawan. 2009. *Panduan Praktis Perpajakan*.

Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Bohari, 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI.

Press.

Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muljono, Djoko. 2009. *PPH dan PPN Untuk Berbagai Kegiatan Usaha*.

Yogyakarta. Andi.

Nick Devas, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, Roy Kelly. Edisi terj

oleh Masri Maris. 2009. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*.

Jakarta: Universitas UI Press.

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja

Grafindo.

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Supramono dan Teresia Woro Damayanti. 2005. *Perpajakan Indonesia,*

*Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Zain, Mohammda. 2007. *Manajemem Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

### **Non Buku**

Sutrisno. 2002. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Semarang)*.

Suwarno, Agus Endro dan Ningsih, Suharti. Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7 (2): 162-173.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.